

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Amiruddin, dan H. Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Aminuddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. ctk Ketiga. Citra Aditya Bandung.
- Hilman Hadikusuma. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- H. Abu Ahmadi, dkk. 2002. *Pengaruh Masyarakat Terhadap Perkembangan Sosial* .PT Prineka Cipta. Jakarta
- Marcus Priyo Gunarto. 2011. *Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Moeljatno. 2012. *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara, cet ke- 30. Jakarta.
- Nur Basuki Winamo. 2008. *penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi*. laksbang mediatama. Yogyakarta.
- Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*. Edisi Pertama. ctk Kesatu, Rajawali Press. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1996. *Sosiologi Suatu pengantar*. Rajawali Pers. Bandung.
- , 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Soetomo. 2008. *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Van Hoeve. *Ensiklopedia Indonesia, Jilid 7*. Jakarta: Ichtiar Baru.

## **JURNAL**

Dhita Asri Aryani Putri, Indarja, Amiek Soemarmi. 2017. *Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, Dan Pengemis Di Kota Semarang*. DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 6, Nomor 2.

Herni Susiani. 2017. *Fungsi Polisi pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah (Studi Penertiban PKL Di Bandar Lampung)*. Volume 10 issue 1. FIAT JUSTISIA. Fakultas Hukum. Bandar Lampung.

Kadek Rahmitha Parta, Dewi A.A Ngurah Gede “Penertiban Gelandangan Dan Pengemis Guna Meningkatkan Pariwisata Di Kota Denpasar” Driksen Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Muh. Hasrul, “Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah”, (Jurnal Amana Gappa Vo. 25 No. 2 Tahun 2017) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

## **SKRIPSI**

Dewi Muthmainnah. 2010. “Tinjauan Hukum terhadap Tindakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Bangunan yang Disertai dengan Pengrusakan Barang”. Skripsi pada program Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Eka Novianti Pertiwi. 2014. “Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Kota Makassar” Skripsi Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Luqmanul Hakim AZ. 2010. "Perbedaan Motivasi Kerja Antara Pengemis Dan Pengamen". skripsi pada fakultas psikologi universitas muhammadiyah surakarta.

Nazza Qisthi Wahyuri. 2018. "*Pembinaan Agama Terhadap Anak Gelandangan Dan Pengemis (Gepeng) Di Upt Pelayanan Sosial Gelandangan Dan Pengemis Binjai*", Skripsi Pada Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Nevirianty Sukma. 2018. "Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menanggulangi Anak Jalanan Yang Mengganggu Ketertiban Umum Di Kota Bandar Lampung" Skripsi Pada Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung

## **PERATURAN**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (Pp) Nomor 31 Tahun 1980 (31/1980) Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Walikota Makassar Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Kota Makassar No. 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen Di Kota Makassar

## **WEBSITE**

Dayat Rangga Mbozo, gelandangan dan pengemis,  
<http://www.dayatranggambozo.blogspot.com/2011/05/gelandangan-dan-pengemis-gepeng.html?m>

Jumadi mappanganro. Minggu 24 Juni 2019 pukul 10:55.  
TribunMakassar.com.  
<https://makassar.tribunnews.com/2012/06/24/pengemis-makin-marak-di-makassar>

Akbar Nur Qadri. 28 Maret 2019 pukul 13:59. CelebesMedia.id.  
<https://celebesmedia.id/celebes/artikel/1013280319/dinas-sosial-makassar-kewalahan-tertibkan-gepeng-dan-pak-ogah> (koran online)

Amrie Hakim. Rabu 2 November 2011. HukumOnline.com.  
[Hukumonline.com/klinik/detail/lt4e3e380e0157a/apa-definisi-ketertiban-umum](http://Hukumonline.com/klinik/detail/lt4e3e380e0157a/apa-definisi-ketertiban-umum)

# LAMPIRAN

## Surat Keterangan Telah Meneliti Di Kantor Satpol Pp Kota Makassar



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
Jalan Jenderal Achmad Yani No. 2 Telepon (0411) 3620217  
**MAKASSAR**



### SURAT KETERANGAN

Nomor : 106/322/PO1-PP/VI/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : MUHAMMAD IQBALSH  
N i p : 197803252009011007  
Pangkat/Golongan : Pembina ( IV/a)  
Jabatan : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja  
Unit Kerja : Sat. Pol PP Kota Makassar

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : LULU ANUGRAWATI  
Nim/ Jurusan : B12116012 / Hukum Adm. Negara  
Lembaga : Mahasiswa ( S1 ) UNIVERSITAS HASANUDDIN  
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10 Makassar

Benar telah melaksanakan penelitian pada instansi pemerintah Kota Makassar Unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar. Berkaitan penyusunan skripsi dengan judul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PENGEMIS DI KOTA MAKASSAR"

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk digunakan seperlunya .

Makassar, 16 Juni 2020

An. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja



MUHAMMAD IQBALSH  
Pangkat : Pembina (IV/a)  
NIP : 19780325 200901 1 007



## Surat Keterangan Telah Meneliti Di Dinas Sosial Kota Makassar



### PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS SOSIAL



Jalan A. R. Hakim No. 50 Makassar 90211  
Telp. (0411) - 448313 Fax. (0411) - 448313  
Website : [www.dinsos.makassar.go.id](http://www.dinsos.makassar.go.id) Email: [dinsos@makassar.go.id](mailto:dinsos@makassar.go.id)

Makassar, 26 Juni 2020

Nomor : 460469/Dinsos/VI/2020  
Lampiran : -  
Perihal : Telah Melakukan Penelitian

Kepada Yth. Dekan Fak. Hukum  
Univ. Hasanuddin Makassar

Di -  
Makassar.

Dengan Hormat,

Sehubungan surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor: 070/709-II/BKBP/VI/2020, Tanggal 11 Juni 2020, Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa:

Nama : LULU ANUGRAWATI  
NIM/Jurusan : B12116012 / Hukum Adm. Negara  
Pekerjaan : Mahasiswa S1 / UNHAS  
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km.10, Makassar  
Judul : **"TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN TUGAS  
POLISI PAMONG PRAJA PADA PENERTIBAN  
PENGEMIS DI KOTA MAKASSAR"**

Telah mengadakan Penelitian pada Instansi/ Wilayah Dinas Sosial Kota Makassar dalam rangka Penyusunan Skripsi sesuai dengan judul di atas, yang dilaksanakan mulai tanggal 11 Juni s/d 15 Juli 2020.

A.N KEPALA DINAS  
Kasie. Penyuluhan dan Penelitian

  
**Hatma, S. Sos**  
Pangkat: Penata Tk.1  
NIP : 19680529 199102 2 002

Tembusan :

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prop. Sul-sel di Makassar
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prop. Sul-Sel di Makassar
3. Mahasiswa/Praja yang bersangkutan
4. Arsip